

SKRIPSI

**GAYA KEPEMPINAN CAMAT SANGGAR KABUPATEN BIMA
TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA**

Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Skripsi



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT SANGGAR KABUPATEN BIMA TERHADAP
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA**

Disusun Oleh :

Sudirman
2020B1D008

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi

Pembimbing I

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

Sadrul Imam, S.IP., M.IP
NIDN. 0831129110

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Yudi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

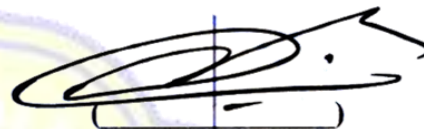
LEMBAR PENGESAHAN

**GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT SANGGAR KABUPATEN BIMA
TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA**

Oleh ;
Sudirman

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 22 Juli 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 008075914



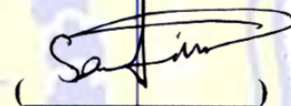
Ketua

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204



Anggota I

Sadrul Imam, S.IP., M.IP
NIDN. 0831129110



Anggota II

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Mataram, 23 Juli 2024

Mahasiswa,



Sudirman

2020B1D008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN
NIM : 2020B1D008
Tempat/Tgl Lahir : Taloko, 13, Juni, 2007
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 342 076 811
Email : sudirman6363@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima
Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/28

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 24 - Juli - 2024
Penulis



SUDIRMAN
NIM. 2020 B1D008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN
NIM : 2020B1D008
Tempat/Tgl Lahir : Taloko, 13, Juni, 2003
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082342 076 811
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima
Terdapat Efektivitas Implementasi Dana Desa

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 24 - Juli, 2024
Penulis



SUDIRMAN
NIM. 2020B1D008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

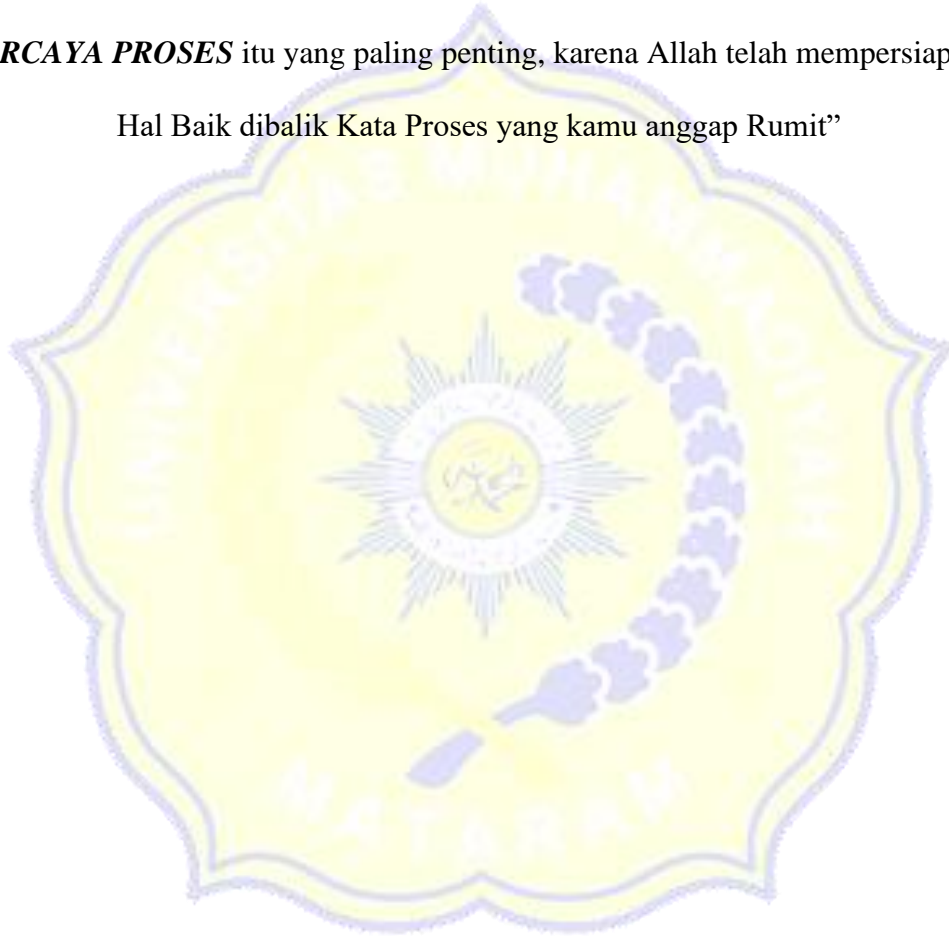
“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat Bukan Berati Gagal, Cepat Bukan Berati Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.

PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan

Hal Baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap Rumit”



PERSEMBAHANKU

Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat hidayah, dan rezeki atas semua yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini dan Allhamdulillah skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Selain itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang selalu mendukung penulis yaitu:

1. Untuk kedua orang tua penulis tercinta Ibu **Sumarni** dan Bapak **Firdaus**, terimakasih telah banyak berkorban, memberiku dukungan dan dorongan, serta do'a nasehat dan kasih sayang.
2. Untuk diri sendiri, terimakasih telah mau tetap bersabar, berjuang dan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT.
3. Untuk kedua kakak ku tercinta **M. Ariyadin, S.Pd dan Sumiati, S.Pd** dan seluruh **Keluarga Besar** penulis, terimakasih banyak atas do'a dan motivasinya.
4. Kepada teman-teman seperjuangan ku Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 kelas B terimakasih atas waktu kebersamaannya selama ini.
5. Kepada dosen-dosen Ilmu Pemerintahan terimakasih banyak atas ilmu dan motivasinya.
6. Almamaterku dan Kampus Hijau Universitas Muhammadiyah Mataram
7. **Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya pemilik NIM 2020A1H09 LILIS KARLINA. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis tunjukan ke haribaan Allah SWT, Alhamdulillah yang atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Skripsi berjudul *Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa* ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Untuk dapat menyelesaikan **Skripsi** ini, penulis memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, tiada kata yang layak penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, khususnya kepada:

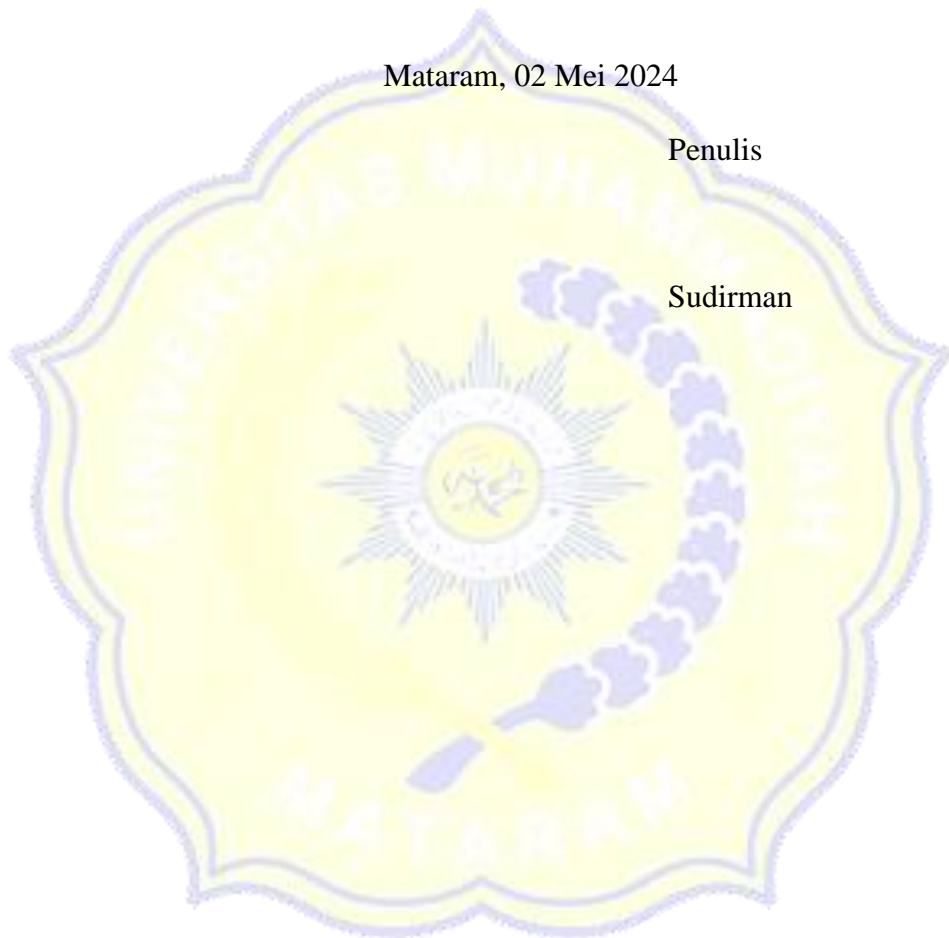
1. Drs. Abdul Wahab., MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
 2. Dr. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
 3. Drs. Amil MM. pembimbing I yang dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 4. Sadrul Imam, S.IP.,M.IP. pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Teman – teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, yang telah berjuang bersama saling memberikan dukungan.
 6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terimakasih atas kebersamaan dan semangat selama ini.

Penulis telah berusaha menyusun Skripsi ini sesempurna mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari seluruh pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan *Skripsi* ini.

Mataram, 02 Mei 2024

Penulis

Sudirman



ABSTRAK

GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT SANGGAR KABUPATEN BIMA TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA TAHUN 2024 (STUDI KASUS DESA KORE SANGGAR BIMA)

SUDIRMAN
2020B1D008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi dana desa oleh pemerintah desa dalam masyarakat dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa, di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Fokus penelitian ini adalah sumber daya, disposisi, struktur organisasi, pencapaian tujuan dan efisiensi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi Dana Desa dari desa itu sendiri untuk meningkatkan pembangunan dengan melakukan pembangunan di desa serta melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal meningkatkan pembangunan di Desa Kore Kecamatan Sanggar pemerintah desa melakukan pembangunan fisik maupun non fisik meskipun belum bisa dikatakan maksimal pembangunan yang dilakukan juga berdampak bagi ekonomi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, selain itu pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk memudahkan mobilitas seperti pembangunan jalan ataupun jembatan. Dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa mulai terlihat. Gaya kepemimpinan yang tepat mampu mencerminkan besarnya tanggung jawab atasan kepada karyawannya. Ketika karyawan mendapat contoh kepemimpinan yang tepat dari atasan, hal ini mampu mendorong karyawan untuk bersikap disiplin didalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diharapkan para pimpinan mampu memberikan contoh yang tepat bagi para karyawan ataupun pegawainya.

Kata Kunci: Kepemimpinan dan Efektivitas Dana Desa

ABSTRACT

The objective of this study aims to identify the elements that shape the image of Bima City as a Waterfront City area in Rasanae Barat District and to analyse the arrangement of the area. The method used is descriptive qualitative, with a library and field research approach. Data was collected through observation, interviews with sources, and documentation from relevant institutions. The results of the study show that the image-forming elements include: 1) **Path**: primary arterial and collector roads connecting community activities along the waterfront, 2) **Edge**: Bima Bay, providing aesthetic value and identity, 3) **Nodes**: intersections and parks as area markers, 4) **District**: harbour, commercial, residential, and tourism districts with unique characteristics, and 5) **Landmark**: the water fountain monument and Terapung Mosque, functioning as iconic symbols. In terms of area arrangement, improvements are needed in parking, pedestrian walkways, and harmonious greening, as well as enhanced facilities in node elements. Revitalization of diminishing landmarks is also essential to create a good visual city image. This research is expected to contribute to sustainable development and create a comfortable and attractive environment in Rasanae Barat District, Bima City.

Keywords: Waterfront City, Path, Edges, Nodes, District, Landmark, Urban Planning, City Image

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

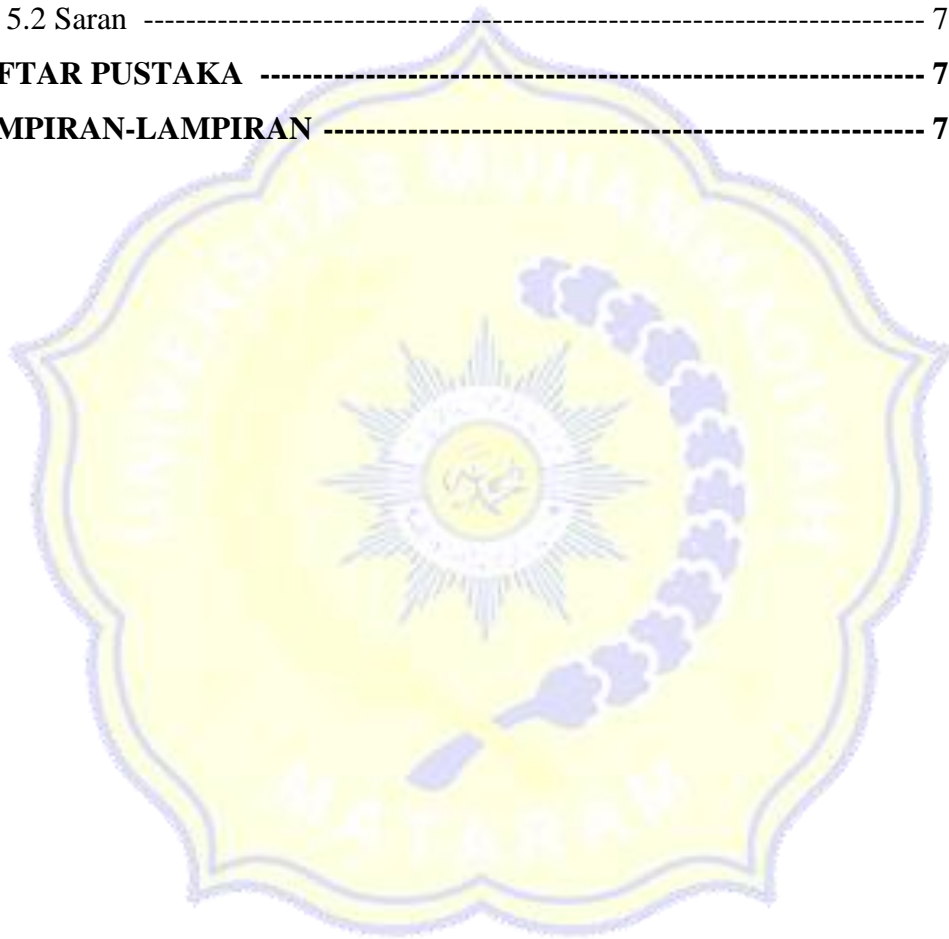
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Tentang Kepemimpinan	14
2.3 Tinjauan Tentang Camat Dan Kecamatan	24
2.4 Tinjauan Tentang Dana Desa	28
2.5 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Yang Digunakan Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Jenis Dan Sumber Data	38
3.4 Informan	39

3.5 Teknik Pengumpulan Data -----	40
3.6 Teknik Analisis Data -----	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN -----	48
4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian -----	48
4.2 Hasil Dan Pembahasan -----	56
BAB V PENUTUP -----	74
5.1 Kesimpulan -----	74
5.2 Saran -----	75
DAFTAR PUSTAKA -----	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN -----	77



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Wilayah Sanggar 40

Tabel 4.2 Batas Wilayah 42

Tabel 4.3 Nama-nama Desa Kecamatan Sanggar 42

Tabel 4.4 Anggaran Pembelanjaan Desa Kecamatan Sanggar 42

Tabel 4.5 Jumlah Pendidikan 43

Tabel 4.6 Mata Pencahrian Pokok Penduduk 44

Tabel 4.7 Ketersediaan Sarana dan Ibadah 46

Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Sanggar 47

Tabel 4.9 Jumlah Perangkat Camat Sanggar 58

Tabel 4.10 Pencapaian Pembangunan di Kecamatan Sanggar 62

Tabel 4.11 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sanggar 63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gaya kepemimpinan yang efektif mampu merefleksikan besarnya tanggung jawab seorang pemimpin terhadap anggota timnya. Ketika bawahan mendapatkan contoh kepemimpinan yang tepat dari atasannya, hal ini dapat memotivasi mereka untuk bersikap disiplin dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diharapkan para pemimpin dapat memberikan teladan yang positif bagi bawahan atau para stafnya.

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu rencana berhasil diwujudkan. Semakin banyak rencana yang terimplementasi, semakin tinggi efektivitas kegiatan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dari suatu metode atau upaya tertentu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Proses produksi dianggap efektif apabila memenuhi sejumlah kriteria, seperti mampu memberikan pengaruh, menimbulkan perubahan, atau menghasilkan output yang diharapkan. Dalam merumuskan tujuan instruksional, efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Semakin banyak tujuan yang terpenuhi, semakin efektif proses produksi tersebut.

Dana desa adalah sumber pendanaan yang esensial dan fundamental untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Efektivitas implementasi dana desa sangat penting untuk memastikan

penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat (Undang-undang No. 6 Tahun 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Permendagri ini juga mengatur secara rinci mengenai ketentuan formal terkait alokasi dana desa, yang mencakup tujuan, tata cara perhitungan besaran anggaran per desa, tata cara penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban. Setiap ketentuan ini disusun berdasarkan komposisi dan kebutuhan desa, dengan harapan bahwa alokasi dana desa ini dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mendistribusikan dan mengelola setiap kebutuhan desa terkait anggaran yang diterima dari pemerintah pusat.

Sasaran dari program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah memberdayakan masyarakat desa melalui program pembangunan yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan merupakan dasar penting dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mengelola dana tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat desa menjadi subjek utama pembangunan, sesuai dengan konsep pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk

menentukan pilihan dan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.

Kecamatan merupakan wilayah administratif di tingkat Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang camat atau istilah lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. Camat berperan sebagai pemimpin kecamatan, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, tugas camat meliputi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah desa serta tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengimplementasikan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terdapat berbagai peran penting yang harus dilaksanakan oleh seorang camat. Salah satu tugas yang diemban oleh camat adalah memfasilitasi desa dalam upaya pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi pemanfaatan segala sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pembinaan dan pengawasan camat ini sangat perlu dilakukan, agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Peran camat dalam implementasi dana desa memiliki peran yang krusial dalam implementasi dana desa. Sebagai pemimpin ditingkat kecamatan, camat bertanggung jawab dalam mengawasi, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan program dan proyek yang didanai oleh dana desa. (UU No. 17 Tahun 2018)

Gaya kepemimpinan camat dapat mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa. Gaya kepemimpinan yang efektif, seperti kepemimpinan partisipatif, transformasional, atau kolaboratif, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Namun, jika gaya kepemimpinan camat kurang efektif, seperti otoriter atau kurang transparan, dapat menghambat implementasi dana desa dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.

Implementasi dana desa juga dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas administrasi, korupsi, ketidaktransparan, dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga problem-problem dasar inilah yang membuat penulis tertarik dalam mengangkat judul ‘Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa’.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah tentang gaya kepemimpinan camat terhadap efektivitas implementasi dana desa:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan camat mempengaruhi kualitas koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam implementasi dana desa?
2. Bagaimana gaya kepemimpinan camat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang gaya kepemimpinan camat terhadap efektivitas implementasi dana Desa:

1. Untuk mengidentifikasi berbagai gaya kepemimpinan yang umum digunakan oleh camat dalam mengelola implementasi dana Desa.
2. Untuk menganalisis hubungan antara gaya kepemimpinan camat dengan efektivitas implementasi dana Desa.
3. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan camat dalam mengelola implementasi dana Desa.
4. Untuk memahami persepsi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan camat dalam konteks implementasi dana Desa.
5. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh camat dalam mengimplementasikan dana Desa dengan efektif.

Tujuan penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi dana Desa dalam konteks gaya kepemimpinan camat.

1.4 Manfaat Penelitian

Ingin Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan pengaruh gaya kepemimpinan camat dalam implementasi dana Desa. Hal

ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memahami pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam penggunaan dana Desa

1. Secara Akademik

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan studi (S1) di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang berarti bagi lembaga akademik yang berperan sebagai pusat diseminasi pengetahuan dan prakarsa pemerintah di bidang Ilmu Sosial dan Politik.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi ilmiah tentang Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan tentang Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar, Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa.

Manfaat-manfaat ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas implementasi dana Desa dan pembangunan di tingkat desa secara keseluruhan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Tedahulu

Judul penelitian ini adalah “Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa”. Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian yang relavan antara lain sebagai berikut.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Menurut Veithzal Rivai (2004:64)	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi	Persamaan, antara peneliti Veithzal Rivai, dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Kepemimpinan. Perbedaan, antara penelitian Veithzal Rivai, dengan peneliti	Berdasarkan hasil penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang menunjang atau yang mempengaruhi kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Dan mengenai pengertian gaya kepemimpinan didas, dapat disimpulkan bahwa

			<p>memiliki perbedaan yaitu, penelitian Veithzal Rivai membahas tentang, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Sedangkan peneliti membahas tentang, Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa. Itulah persamaan dan perbedaan antara penelitian</p>	<p>gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin dalam memberikan arahan dengan memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu.</p>
--	--	--	--	---

			terdahulu dan peneliti.	
2.	Arifin, Syamsul (2012)	<i>LEARDERSHIP</i> Ilmu dan Seni Kepemimpinan.	<p>Persamaan, antara penelitian Arifin, Syamsul, dengan peneliti sama-sama meneliti tentang Kepemimpinan.</p> <p>Perbedaan, antara penelitian Arifin, Syamsul dengan peneliti memiliki perbedaan yaitu, Arifin, Syamsul meneliti tentang, “<i>LEADERSHIP</i> Ilmu dan Seni Kepemimpinan”. Sedangkan peneliti membahas</p>	<p>Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memimpin orang lain dengan cara memberikan petunjuk, atau dengan dimaknai secara lebih formal bahwa dalam menjalankan kepemimpinan seseorang tersebut memberikan perintah-perintah untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasi, mempengaruhi orang lain dalam rangka melakukan kerja sama</p>

			<p>tentang, “Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa”.</p>	<p>kearah pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan. Aspek kajian kegiatan pemimpin merupakan aspek mendasar untuk diketahui dan dipahami oleh pemimpin karena jika pemimpin tidak dapat mengendalikan diri sendiri bagaimana ia dapat mengendalikan orang lain.</p>
3.	<p>Riska Yuliani (2012:76)</p>	<p>Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di</p>	<p>Persamaan, antara peneliti Riska Yuliani, dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan meneliti tentang</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar</p>

		<p>Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Dana Desa. Perbedaan, antara penelitian Riska Yuliani, dengan peneliti memiliki perbedaan yaitu, Riska Yuliani meneliti tentang, “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali”. Sedangkan penelitian Peneliti membahas</p>	<p>responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infastruktur publik, peningkatan pengetahuan</p>
--	--	----------------------------	---	---

			tentang “Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa”.	masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4.	Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi dan Denok Kurniasih (2018:66)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa	Persamaan, antara penelitian Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih, dengan peneliti yaitu, sama-sama membahas tentang Efektivitas Implementasi Dana Desa. Perbedaan,	Jadi efektivitas didasarkan pada 4 ketentuan, yaitu: (1) ketentuan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar yang tepat, (2) ketentuan pelaksana dilihat dari telah diimplementasikannya

			<p>antara penelitian Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih, dengan peneliti memiliki perbedaan yaitu, Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih meneliti tentang, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa”. Sedangkan penelitian peneliti</p>	<p>kebijakan oleh aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya, (3) ketetapan target dilihat dari kondisi target yang intervensi sangat mendukung, dan (4) ketetapan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik antar aktor perumus kebijakan, dan lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan adanya lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi. Impelementasi dapat berjalan cukup efektif karena faktor</p>
--	--	--	--	--

			<p>membahasa tentang, “Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa”.</p>	<p>partisipasi masyarakat dan tersedianya peralatan dan perlengkapan. Namun juga terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima.</p>
--	--	--	---	---

2.2 Tinjauan Tentang Kepemimpinan

a) Pengertian Pemimpin

Kepemimpinan, dalam bidang kajian Ilmu Pemerintahan, merujuk pada kapasitas seseorang dalam mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi guna mencapai efisiensi. Untuk memastikan terjadinya tatanan dalam aktivitas organisasi, diperlukan pengaturan yang meliputi alokasi tugas, prosedur kerja, dan keterkaitan antara berbagai tugas. Seorang pemimpin, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai individu yang mendapatkan predikat sebagai pemimpin dengan kewenangan yang melekat padanya, dan oleh karena itu, ia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Menurut pandangan Hendry Pratt Fairchild dalam Arifin (2012:1), seorang yang berperan sebagai pemimpin memiliki tugas untuk menginisiasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, atau mengendalikan usaha atau upaya orang lain dalam konteks tingkah laku sosial. Pemimpin tersebut dapat mencapai pengaruh dan otoritas melalui prestise, kekuasaan, atau posisi yang dimilikinya (dalam pengertian yang lebih luas). Lebih jauh lagi, seorang pemimpin juga dapat membimbing dan memandu dengan menggunakan kemampuan persuasifnya serta mendapatkan penerimaan sukarela dari pengikutnya (dalam pengertian yang lebih sempit).

Menurut pandangan Anoraga (1992:8), seorang pemimpin merupakan individu yang memiliki kompetensi yang spesifik dan mampu mempengaruhi kelompok-kelompok yang dipimpinnya, baik dengan atau tanpa pengakuan resmi. Tujuan dari pengaruh ini adalah untuk mendorong kerjasama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut pandangan John Gage Allee dalam Kartono (1983:39), pemimpin dapat diartikan sebagai seorang pemandu, penunjuk arah, penuntun, dan komandan. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan bahwa seorang pemimpin adalah individu yang memimpin orang lain melalui memberikan petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah secara formal. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasi, dan

mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Aspek kegiatan pemimpin menjadi hal yang mendasar untuk dipahami dan dikuasai oleh seorang pemimpin, karena jika pemimpin tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana ia dapat mengendalikan orang lain.

Menurut pandangan Mann dalam Kaloh (2003:49), terdapat enam jenis kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Kegiatan yang bersifat teknis, yang melibatkan penerapan metode, teknik, dan penggunaan peralatan serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif.
2. Kegiatan interpersonal, yang berhubungan dengan memelihara hubungan antarpribadi dengan orang lain atau yang lebih dikenal sebagai hubungan manusia.
3. Kegiatan administratif, yang melibatkan pelaksanaan tugas manajerial.
4. Kegiatan perencanaan, yang melibatkan perumusan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
5. Kegiatan pengorganisasian, yang melibatkan pengaturan sumber daya dan struktur organisasi.
6. Kegiatan kontrol, yang melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian tujuan.

Sementara itu, menurut Siagian dalam Sunindhia dan Widiyanti Ninik (1993:75), terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik, antara lain:

1. Memiliki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tuntutan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan yang luas.
3. Memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui kepemimpinannya.
4. Memahami dengan jelas sifat hakiki dan kompleksitas dari tujuan yang ingin dicapai.
5. Gemar dan cepat dalam mengambil keputusan.

b) Konsep Kepemimpinan

Menurut pandangan Terry dalam Utomo (2008:12), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat ini menekankan pentingnya pengaruh dan motivasi dalam memimpin.

Selain itu, menurut Abdulrahman Arifin dalam Moenir (1988:232), kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memobilisasi dan menggerakkan orang-orang agar mengikuti pemimpin. Definisi ini menyoroti pentingnya kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain dalam konteks kepemimpinan.

Lebih lanjut, Richard dan Eigel dalam Susilo (2005:9) mengartikan kepemimpinan sebagai cara untuk mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai-nilai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan pentingnya peran pemimpin dalam mengkomunikasikan visi, memperjuangkan nilai-nilai, dan menciptakan kondisi yang mendukung dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar bekerja dengan kesadaran dan keikhlasan dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin mampu mempengaruhi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk bekerja dengan ikhlas dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Kepemimpinan melibatkan komunikasi visi, pengartikulasian nilai-nilai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Mulyono dan Kurniawan (2013:130), terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan. Salah satu aspek yang penting adalah menjunjung tinggi etika yang mulia dan bijaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat yang dipimpin. Kepemimpinan yang baik harus mampu menghormati dan menghargai masyarakat dengan tulus ikhlas, sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut. Hal ini berkaitan erat dengan konsep

kepemimpinan yang berbasis pada ilmu sosial dan politik, terutama dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan. Sebagai pemimpin, kita dituntut untuk menjaga integritas moral serta mengutamakan kepentingan masyarakat dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang bersifat mulia dan bijaksana menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dalam mengelola pemerintahan dan masyarakat secara efektif dan efisien.

Kepemimpinan dalam konteks ilmu sosial dan politik, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan, dapat dikatakan sebagai suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. Dalam hal ini, terdapat tiga aplikasi penting yang harus diperhatikan.

1. Pertama, kepemimpinan melibatkan interaksi dengan orang lain, baik sebagai bawahan maupun pengikut. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota kelompoknya secara efektif, sehingga dapat mempengaruhi mereka dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukanlah suatu hal yang dilakukan secara individual, melainkan melibatkan kolaborasi dan kerjasama antara pemimpin dan anggota kelompok.
2. Kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan yang seimbang antara pemimpin dan anggota kelompok. Dalam konteks ini, pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaannya

secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan dan kontribusi setiap anggota kelompok. Pengambilan keputusan dan pemberian wewenang harus dilakukan dengan proporsional dan adil, sehingga dapat menciptakan iklim kerja yang harmonis dan produktif.

3. Ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku pengikutnya. Kekuasaan tidak hanya berarti memiliki otoritas formal, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi anggota kelompok melalui berbagai cara. Pemimpin harus mampu mengenali kebutuhan dan karakteristik individu dalam kelompoknya, sehingga dapat menggunakan strategi kepemimpinan yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Jadi, kepemimpinan dalam ilmu sosial dan politik, terutama dalam kajian Ilmu Pemerintahan, melibatkan interaksi dengan orang lain, distribusi kekuasaan yang seimbang, dan kemampuan mempengaruhi perilaku melalui berbagai bentuk kekuasaan. Pemimpin harus mampu mengelola dan memanfaatkan faktor-faktor ini dengan bijaksana untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

c) Fungsi Kepemimpinan

Peran kepemimpinan berkaitan erat dengan konteks dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang menunjukkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan di luar konteks tersebut. Peran kepemimpinan merupakan fenomena sosial, karena harus diaktualisasikan melalui interaksi antar individu dalam konteks sosial suatu kelompok atau organisasi.

Menurut Siagian (1999:56-58), dimensi-dimensi yang terkait dengan fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi pengarahan (direction): kemampuan pemimpin dalam mengarahkan tindakan atau aktivitas. Ini melibatkan komunikasi satu arah di mana pemimpin menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana perintah harus dilaksanakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.
2. Dimensi dukungan (support): tingkat keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi. Ini melibatkan komunikasi dua arah di mana pemimpin berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk mendapatkan masukan dan umpan balik guna

meningkatkan dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan operasionalisasi, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan menjadi lima fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pemandu: pemimpin sebagai komunikator yang menetapkan arahan untuk dilaksanakan secara efisien. Kepemimpinan yang produktif memerlukan kemampuan untuk memobilisasi dan memotivasi orang lain agar bersedia melaksanakan arahan.
2. Fungsi Interaksi: pemimpin berinteraksi dengan bawahan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan. Interaksi ini bertujuan agar keputusan pemimpin mendapatkan dukungan dan lebih mudah diarahkan, sehingga kepemimpinan berjalan efektif.
3. Fungsi Kolaborasi: pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Kolaborasi dilakukan dalam kerangka kerja sama yang terstruktur dan terarah, tanpa mencampuri atau mengambil alih tugas pokok orang lain. Pemimpin tetap berfungsi sebagai pemimpin, bukan pelaksana.
4. Fungsi Delegering: pemimpin memberikan kewenangan kepada orang lain untuk membuat atau menetapkan keputusan,

baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pemimpin. Delegering ini didasarkan pada keyakinan bahwa penerima delegering adalah mitra pemimpin yang memiliki prinsip, persepsi, dan aspirasi yang sejalan.

5. Fungsi Pengawasan dan pengendalian: Fungsi pengawasan merupakan upaya kepemimpinan yang bertujuan mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan, pemimpin yang sukses dapat memastikan bahwa tugas-tugas kelompok atau organisasi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d) Tipe Kepemimpinan

Menurut Rivai (2009:42), Kepemimpinan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Kepemimpinan Autokratik

Pemimpin berperan sebagai penguasa tunggal, dengan anggota kelompok hanya sebagai pelaksana keputusan dan perintah dari pemimpin. Pemimpin cenderung merasa lebih unggul dalam segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Keahlian dan kemampuan bawahannya dianggap rendah, sehingga mereka dianggap tidak mampu melakukan apapun tanpa adanya perintah.

2. Kepemimpinan Laissez-faire (bebas kendali)

Pemimpin berfungsi sebagai simbol atau lambang. Kepemimpinan dilakukan dengan memberikan kebebasan penuh kepada anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka masing-masing, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil. Pemimpin hanya berperan sebagai penasihat.

3. Kepemimpinan Demokratis

Mengedepankan manusia sebagai faktor utama dan yang paling penting dalam setiap kelompok. Pemimpin melihat dan menghargai anggota kelompok sebagai individu yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya sendiri. Keinginan, kemampuan, pemikiran, pendapat, kreativitas, dan inisiatif yang beragam diperlakukan dengan baik. Jenis kepemimpinan ini berusaha untuk memanfaatkan partisipasi aktif, dinamis, dan terarah dalam pengambilan keputusan, dengan memberikan kepentingan pada musyawarah, yang dilaksanakan pada setiap tingkat dan di dalam setiap unit kelompok.

e) **Gaya Kepemimpinan**

Gaya kepemimpinan (pola kepemimpinan / *leaderhip style*) merupakan beragam pola perilaku yang disukai oleh pemimpin dalam upaya mengarahkan dan mempengaruhi para pekerja. Menurut Maulana Agus (1992:46), gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai bagaimana seorang individu berperilaku ketika mencoba mempengaruhi prestasi

orang lain. Gaya kepemimpinan ini merupakan gabungan antara perilaku yang bersifat direktif dan suportif.

1. Perilaku yang bersifat Direktif

Perilaku ini meliputi memberikan instruksi yang jelas kepada individu mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, kapan melakukannya, serta mengawasi pelaksanaannya dengan ketat.

2. Perilaku yang bersifat Suportif

Perilaku ini meliputi mendengarkan orang lain, memberikan dukungan dan semangat terhadap usaha mereka, serta membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Sulistiyani Teguh Ambar (2011:98), gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi tiga gaya, yaitu:

1. Gaya Otokratis

Gaya kepemimpinan otokratis juga dapat disebut sebagai pencerita. Pemimpin dengan gaya ini cenderung merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung memberikan perintah langsung kepada bawahan.

2. Gaya Demokratis

Gaya kepemimpinan ini juga dikenal sebagai gaya partisipatif. Gaya ini beranggapan bahwa melibatkan anggota organisasi secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan

akan menghasilkan komitmen yang lebih besar terhadap tujuan dan sasaran organisasi.

3. Gaya Kendali Bebas

Gaya ini beranggapan bahwa tugas diberikan kepada kelompok yang kemudian menentukan teknik yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan tujuan mencapai sasaran dan kebijakan organisasi.

2.3 Tinjauan Tentang Camat Dan Kecamatan

a) Pengertian Camat

Menurut ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa kepala kecamatan memiliki peran sebagai camat. Dalam konteks ini, kepala kecamatan bertindak sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat kecamatan yang menerima sebagian wewenang dari bupati atau walikota terkait. Kepala kecamatan memiliki dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dalam kaitannya dengan kewenangan delegatif, kepala kecamatan menerima sebagian kewenangan dari bupati atau walikota. Salah satu aspek kewenangan delegatif yang dimiliki oleh kepala kecamatan adalah dalam hal identifikasi pelayanan. Kepala kecamatan memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan mengenai siapa yang akan menyediakan pelayanan tersebut, apakah dilakukan oleh kantor kecamatan sendiri (sektor publik), pihak swasta, atau melalui kemitraan dengan swasta.

Definisi di atas menunjukkan bahwa camat memiliki posisi sebagai kepala wilayah kerja, yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Namun, perlu dicatat bahwa camat tidak memiliki kewenangan teritorial yang sama seperti daerah kewenangan. Tugas-tugas karakteristik camat meliputi sinkronisasi pemerintahan terhadap semua instansi pemerintah di wilayah kecamatan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, implementasi peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dijalankan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Posisi seorang camat memang berbeda dengan kepala institusi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena camat memiliki peran sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas institusi pemerintahan di kecamatan. Sebagai camat, mereka memiliki wewenang untuk mengatur dan memberikan instruksi kepada anggota masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Selain itu, camat juga bertanggung jawab dalam mengelola warganya agar tercipta keteraturan yang optimal dan menjadikan wilayah tersebut tetap aman. Hal ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan tatanan sosial dalam masyarakat dan memfasilitasi kelancaran aktivitas yang berlangsung di wilayah tersebut. Camat memiliki hak untuk mengatur dan mengorganisir pembagian tugas agar berjalan dengan efektif, lancar, dan sesuai dengan harapan yang ditetapkan.

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa camat sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki keunikannya sendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung prinsip desentralisasi. Keunikan ini melibatkan tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, serta berupaya mencapai ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai bentuk keberhasilan dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan masyarakat dalam upaya memperkuat kesatuan wilayah.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa camat memiliki peran sebagai kepala tim kerja di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab atas lingkungan kerjanya. Sebagai camat, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan dan berfungsi sebagai penafsir makna pemerintahan di wilayah tersebut. Camat juga berperan sebagai perwakilan dari bupati atau walikota di wilayah kerjanya, sehingga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

b) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan yang mencakup koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi upaya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas Camat menurut Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan meliputi:

- 1) Camat memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menjalankan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Pasal 25 ayat (6).
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengoordinasikan upaya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pelayanan umum.
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan di desa dan/atau kelurahan.

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf i ditanggung oleh pihak yang menugaskan.
- 3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dibantu oleh perangkat kecamatan.

c) Kewenangan Camat

Camat memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai tugas yang berkaitan dengan pemerintahan di wilayah kecamatan. Tugas-tugas ini meliputi pengelolaan perizinan, pemberian rekomendasi, koordinasi antarinstansi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan kebijakan, serta penyelenggaraan dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mendelegasikan sebagian urusan otonomi daerah kepada camat, seperti pengelolaan perizinan, pemberian rekomendasi, koordinasi lintas instansi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan kebijakan, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dengan kewenangan ini, camat

bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan di kecamatan, memastikan seluruh tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif di tingkat kecamatan.

2.4 Tinjauan Tentang Dana Desa

Alokasi anggaran yang diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota, yang dikenal sebagai Dana Desa, difokuskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran. Proses ini juga melibatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang relevan dengan esensi permasalahan serta prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi spesifik desa, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang.

Untuk mencapai kesuksesan pembangunan nasional, fokus utama ditujukan pada pembangunan desa. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengimplementasikan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari

APBN. Melalui Dana Desa, desa-desa mendapatkan landasan hukum yang kuat dan memastikan adanya alokasi anggaran pembangunan yang mencukupi setiap tahunnya (Sutoro, 2015).

Pengaturan mengenai pelaksanaan Dana Desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penentuan, dan evaluasi Dana Desa. Semua regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur implementasi Dana Desa agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa. Pedoman ini mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Selain itu, proses pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan baik dan transparan.

Menurut Ahmad Yani (2008:234), menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Terminologi "pemberdayaan" dalam bahasa Inggris disebut "empowerment," yang dapat secara harfiah diterjemahkan sebagai "pemberdayaan" atau "penguasaan." Istilah ini merujuk pada upaya untuk memberikan atau meningkatkan kekuatan kepada komunitas yang terpinggirkan. Menurut Robert Chambers, yang kemudian diikuti oleh Kartasmita (1996), pemberdayaan adalah konsep dalam pengembangan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma yang menempatkan negara dan pemerintah pada posisi sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19), pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal terhadap suatu sistem, dengan tujuan agar sistem tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan keterhubungan yang ada dalam suatu sistem, serta melakukan perbaikan terhadap elemen atau komponen sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat mengembangkan dirinya sendiri. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi suatu sistem untuk membangun dirinya sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005:25), tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk mendukung pembangunan manusiawi yang autentik dan menyeluruh bagi masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang lemah, miskin, marjinal, dan kaum kecil. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan kemandirian secara sosio-ekonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sendiri dan secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Adisasmita (2006), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengoptimalkan dan mengelola sumber daya masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti sumber daya manusia, dana, peralatan, data, rencana, dan teknologi sebagai masukan atau input. Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan aspek proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan, serta aspek keluaran seperti pencapaian, sasaran, efektivitas, dan efisiensi. Selaras dengan itu, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017, pasal 7 menyebutkan bahwa Dana Desa Masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan dari hal ini adalah agar masyarakat desa dapat mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

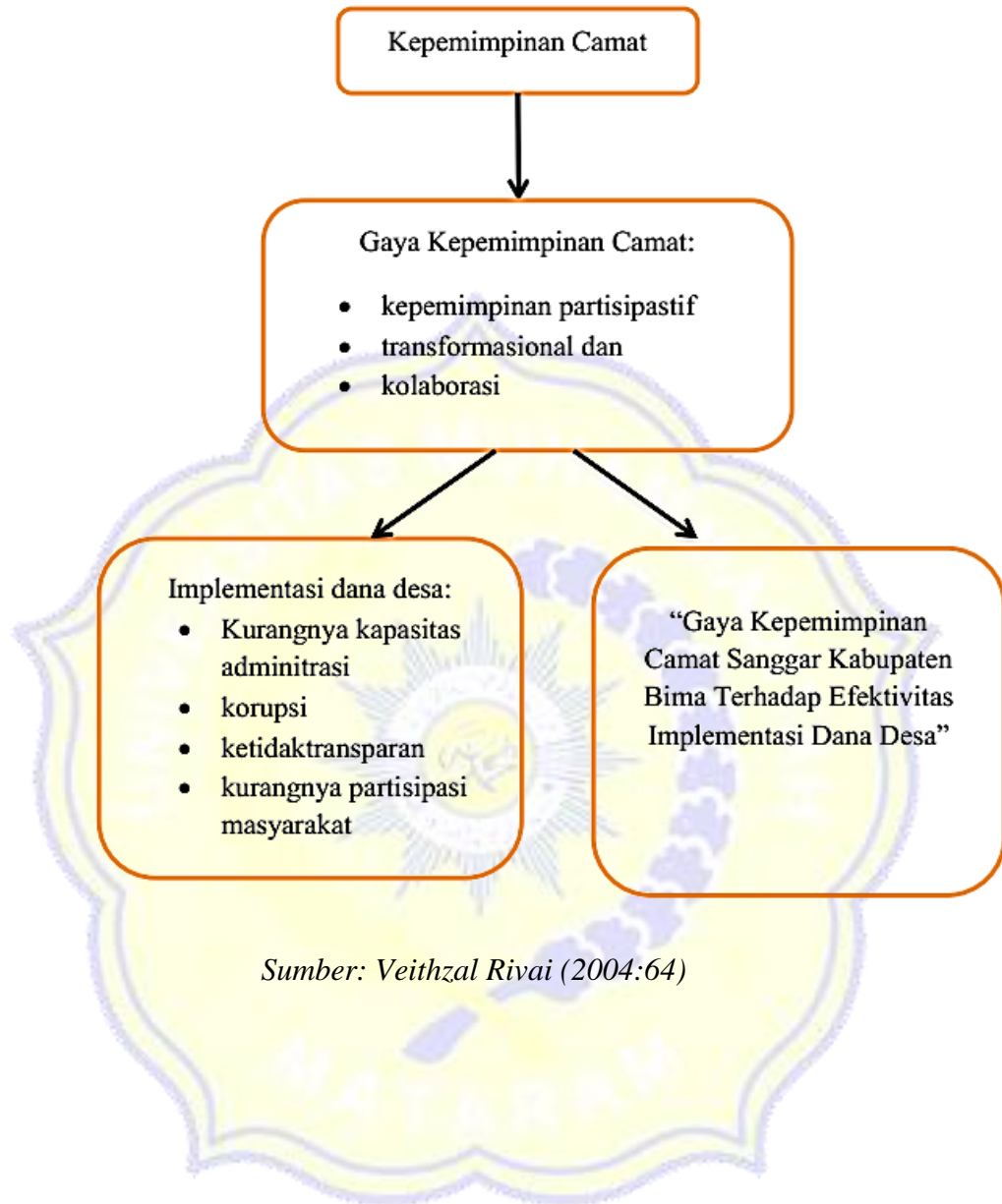
2.5 Kerangka Berpikir

Peran camat dalam implementasi dana desa memiliki peran yang krusial dalam implementasi dana desa. sebagai pemimpin ditingkat kecamatan, camat bertanggung jawab dalam mengawasi, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan program dan proyek yang di danai oleh dana desa.

Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa. Gaya kepemimpinan yang efektif, seperti kepemimpinan partisipatif, transformasional, atau kolaboratif, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Namun jika gaya kepemimpinan camat kurang efektif, seperti otoriter atau kurang transparan, dapat menghambat implementasi dana desa dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.

Implementasi dana desa juga dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas administrasi, korupsi, ketidaktransparan, dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga problem-problem dasar inilah yang membuat penulis tertarik dalam mengangkat judul “Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa”.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Veithzal Rivai (2004:64)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengungkapkan dan mendalami fenomena yang terkait dengan efektivitas implementasi dana desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam, mendeskripsikan secara detail, dan mempertanggungjawabkan secara komprehensif latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam pendekatan ini, data yang diperoleh akan diinterpretasikan secara holistik dan kontekstual, dengan memperhatikan berbagai aspek yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas implementasi dana desa.

Menurut Najir (2003:36), Kajian kualitatif ialah sebuah studi menggunakan data empiris dalam upaya menyelesaikan sebuah dilema dilakukan untuk menetapkan nilai-nilai variabel bebas, baik itu satu variabel atau bahkan lebih (Independen). Tidak ada perbandingan atau kesimpulan yang terbentuk dari penelitian ini. Pendekatan analisis deskriptif, sebagai sebuah metode riset, melibatkan sekelompok individu, objek, koleksi kondisi, sistem riset, maupun peristiwa masa kini yang bertujuan untuk membentuk suatu gambaran atau interpretasi yang terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kore, wilayah administratif Kecamatan Sanggar, yang berlokasi di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penulis menganggap bahwa permasalahan ini sangat menarik mengingat adanya berbagai kendala dalam penggunaan dana Desa yang tidak efektif di wilayah Kecamatan Sanggar. Peneliti telah melaksanakan studi ini pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

- **Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh para peneliti melalui upaya mereka sendiri dengan tujuan yang jelas untuk memecahkan tantangan yang mereka hadapi. Sumber data yang pertama, atau tempat di mana penelitian dilakukan, dikumpulkan secara langsung oleh para peneliti. Para peneliti secara langsung meninjau lokasi penelitian dan lokasi lainnya di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dan mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, berinteraksi, dan melakukan wawancara dengan Camat Sanggar.

- **Data Sekunder**

Data Sekunder mengacu pada informasi yang telah terhimpun untuk maksud selain menyelesaikan tantangan yang sedang dihadapi. Data ini dapat dengan mudah ditemukan, dan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan mencakup dokumen, surat-surat

penting, fotografi, atau gambar lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan di daerah Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

3.4 Informan

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan responden atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang valid dan reliabel berkaitan erat dengan konsep pengambilan sampel. Metode pemilihan responden dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian dan kecukupan data serta informasi daripada kuantitasnya. Oleh karena itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menentukan responden. Pendekatan *snowball sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dimulai dengan memilih sejumlah kecil individu yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang juga memenuhi kriteria tersebut. Proses ini berlanjut hingga jumlah responden yang diinginkan tercapai, sehingga menciptakan jaringan atau rantai sampel yang saling terkait. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam situasi di mana populasi target sulit diidentifikasi atau diakses secara langsung.

Penelitian kualitatif ini melibatkan tujuh (7) responden, sesuai dengan fokus pada kedalaman dan proses. Jumlah responden yang terbatas dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap subjek penelitian. Pemilihan responden didasarkan pada beberapa faktor, termasuk sifat penelitian sebagai studi kasus. Ukuran sampel yang kecil dianggap efektif untuk memahami temuan penelitian secara komprehensif. Selain itu,

pemilihan responden mempertimbangkan keterbatasan kapabilitas, waktu, dan sumber daya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahapan penelitian yang sangat penting adalah pengumpulan data, dan metode yang digunakan harus dapat diandalkan. Dalam pengumpulan data penelitian, data primer menjadi salah satu aspek yang tak tergantikan. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung. Untuk melengkapi data, dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Data primer dihimpun oleh peneliti melalui penerapan berbagai metode yang beragam. Beberapa teknik yang umum dipakai meliputi wawancara, pengamatan langsung, serta kuesioner. Wawancara merupakan metode yang melibatkan interaksi tatap muka antara peneliti dengan responden, di mana sejumlah pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian diajukan, dan jawaban dari responden dicatat secara rinci. Pengamatan langsung, di sisi lain, melibatkan peneliti dalam mengamati secara langsung aktivitas atau fenomena yang tengah diteliti, di mana semua aspek yang dianggap signifikan didokumentasikan. Sedangkan kuesioner adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan serangkaian pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Metode-metode ini diterapkan berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik dari subjek penelitian yang sedang dikaji.

1) Pengamatan (*Observasi*)

Pada penelitian ini, pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala pada subjek penelitian dilakukan melalui observasi partisipatif. Pendekatan ini mengacu pada pengumpulan data dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan subjek. Metode yang digunakan meliputi pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Observasi partisipatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang gejala-gejala yang diamati. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik dan detail mengenai gejala-gejala yang diteliti.

2) Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara mendalam, atau *Depth Interview*, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk berinteraksi dengan informan guna memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Pendekatan ini mengacu pada penggunaan wawancara yang lebih terstruktur dan panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut Susan Stainback (1998), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai peran informan dalam menginterpretasikan peristiwa dan fenomena yang tidak dapat diungkapkan hanya melalui observasi. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya dan memahami sudut pandang informan secara lebih personal. Hal ini memberikan

peluang bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek penelitian serta memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan tetapi juga memperkaya analisis dan interpretasi hasil penelitian.

Terdapat beberapa metode wawancara yang diterapkan, yaitu:

- a. Metode wawancara terstruktur, menggunakan panduan atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti telah memiliki pemahaman yang jelas mengenai data yang dibutuhkan dan fokus pada masalah yang spesifik.
- b. Metode wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang cukup mendalam di mana pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dapat berkembang menjadi lebih komprehensif dan mendalam, dengan tetap mengikuti panduan yang ada.
- c. Metode wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih terbuka dan mendalam dengan panduan yang hanya berupa garis besar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan informasi, yang kemudian digunakan untuk merumuskan pertanyaan mendalam terkait permasalahan yang dipelajari. Dengan demikian, narasumber dan peneliti dapat bertukar informasi secara lebih efektif.

3) Dokumentasi

Data dan informasi dapat diperoleh melalui beragam metode, termasuk pengumpulan dan pencatatan data dokumenter serta pemanfaatan sumber-sumber dari media massa, lembaga pemerintah, dan institusi terkait lainnya. Dalam rangka mengkaji permasalahan implementasi dana desa, penulis melakukan pengumpulan berbagai dokumen dari sejumlah informan dan media yang kredibel. Proses pengumpulan ini melibatkan berbagai bentuk dokumentasi visual yang relevan dan informatif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai topik yang sedang dibahas. Dokumentasi tersebut meliputi laporan resmi, artikel media, serta catatan lapangan yang mendetail, yang secara kolektif mendukung analisis terhadap isu implementasi dana desa. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan validitas dan reliabilitas sumber informasi, guna memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta relevan dengan tujuan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian, di mana informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain dikumpulkan secara sistematis dan diorganisasikan dengan cermat. Tujuan dari proses ini adalah agar data dapat dipahami secara mendalam dan dikomunikasikan secara efektif kepada audiens yang lebih luas. Analisis data yang komprehensif memastikan bahwa data yang

terkumpul dapat diinterpretasikan dengan akurat dan dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara tepat.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan tidak hanya setelah proses pengumpulan data selesai, tetapi juga secara kontinu selama pengumpulan data berlangsung. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai analis yang terus-menerus menilai jawaban yang diberikan selama wawancara. Selama proses wawancara, peneliti aktif menganalisis informasi yang diperoleh dan menyesuaikan pertanyaan berikutnya berdasarkan temuan sementara. Proses ini berlangsung secara iteratif hingga peneliti mencapai titik saturasi, di mana data yang terkumpul dianggap cukup komprehensif dan tidak lagi memberikan informasi baru yang relevan.

Jika setelah analisis lanjutan jawaban yang diperoleh tidak memuaskan atau tidak memberikan tambahan informasi yang signifikan, peneliti akan mempertimbangkan untuk mengakhiri sesi wawancara. Dengan demikian, proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat disajikan dengan kejelasan dan ketepatan yang tinggi, sesuai dengan tujuan awal penelitian.

Analisis data yang dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul, sehingga proses pengumpulan data dapat diarahkan dengan lebih fokus dan mendalam. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis lanjutan dengan mengkategorikan, mengkodekan, dan menginterpretasikan

data. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyusun temuan-temuan yang relevan dan signifikan, sehingga mampu menyajikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan data yang efektif tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan serta memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang diteliti. Analisis data yang cermat dan teliti menjadi kunci dalam menghasilkan penelitian berkualitas tinggi, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan. Dengan demikian, pendekatan metodologis yang diterapkan memungkinkan peneliti untuk mengungkap berbagai dimensi kompleks dari fenomena yang sedang dikaji, serta menyajikan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2006:246).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis model imperatif. Analisis interaktif yang digunakan mencakup empat aliran kegiatan simultan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (verifikasi). Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengorganisir dan menganalisis data yang diperoleh dari responden, sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan reliabel dalam konteks studi yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh, diikuti dengan proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang terstruktur agar memudahkan dalam pengambilan kesimpulan yang didukung oleh verifikasi yang cermat.

Berikut adalah langkah-langkah yang diterakan dalam pelaksanaan penelitian ini:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan upaya pencarian dan penghimpunan informasi mengenai beragam jenis dan format data yang tersedia di wilayah tersebut, diikuti dengan pendataan secara sistematis terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan berkaitan erat dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan fokus utama pada data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Camat terkait. Proses ini tidak hanya mencakup identifikasi dan akuisisi data yang relevan, tetapi juga penilaian validitas dan reliabilitas data untuk memastikan kualitas dan ketepatan hasil penelitian yang diharapkan.

2) Reduksi Data

Reduksi data meliputi pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan tertulis terkait kegiatan lapangan. Proses ini bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan guna mendukung analisis yang lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data digunakan untuk mengkaji Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar di Kabupaten Bima terhadap efektivitas implementasi Dana Desa. Melalui reduksi data, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan terfokus mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keberhasilan pelaksanaan program Dana Desa di wilayah tersebut.

3) Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data sebagai informasi, penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan merupakan tahapan analisis data yang ketiga dan paling signifikan. Tahapan ini, pada akhirnya, akan menghasilkan data kajian mendalam mengenai Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar di Kabupaten Bima dalam konteks Efektivitas Implementasi Dana Desa. Melalui proses analisis yang komprehensif ini, kesimpulan yang valid dan reliabel akan dapat ditarik. Sehingga hasil kajian akan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan dan praktik kepemimpinan pada bidang kajian yang dilakukan.

4) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan bukan hanya merupakan salah satu komponen dari konfigurasi penelitian yang komprehensif, melainkan juga bagian integral dari proses validasi dalam investigasi. Setelah data dikumpulkan dan dipilih dengan cermat, analisis data dilakukan secara mendalam. Dalam proses pengolahan data tersebut, digunakan penalaran induktif untuk mengidentifikasi pola dan mengembangkan teori yang didasarkan pada temuan empiris yang diperoleh. Validasi kesimpulan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat diandalkan dan relevan dengan konteks penelitian yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

Sanggar merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, tepatnya di bawah kaki Gunung Tambora. Selain Sanggar, terdapat pula Kecamatan Tambora yang juga berada di Kabupaten Bima. Kedua kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah daratan Kabupaten Dompu, sehingga menjadikannya bagian integral dari topografi dan administrasi kawasan tersebut. Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora, dengan posisi geografis yang strategis, memiliki peran penting dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah, mengingat letaknya yang berdekatan dengan salah satu gunung berapi aktif yang bersejarah di Indonesia, yaitu Gunung Tambora.

Kecamatan Sanggar dan Tambora awalnya merupakan nama kerajaan yang pernah ada di Pulau Sumbawa sebelum akhirnya lenyap akibat tertimbun abu vulkanik dari dahsyatnya letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Kedua kerajaan tersebut berada di bawah kekuasaan Kesultanan Bima, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Bima. Namun, secara geografis, letak Kecamatan Sanggar dan Tambora berada jauh di luar wilayah administratif Kabupaten Bima, tepatnya diapit oleh Kabupaten Dompu. Jarak antara kedua kecamatan ini dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bima sekitar 124 kilometer, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam menggunakan

kendaraan. Sementara itu, jarak dari ibu kota Kabupaten Dompu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan.

Tabel 4.1
Data Wilayah Sanggar

Kecamatan	
Negara	Indonesia
Provinsi	Nusa Tenggara Barat
Kabupaten	Bima
Kecamatan	Sanggar
Kode Pos	84191
Kode Kemendagri	52.06.09.2003

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

❖ **Visi dan Misi Kecamatan Sanggar**

Sebagai dokumen perencanaan yang merujuk pada Dokumen Kecamatan, seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sanggar harus secara bertahap dan berkesinambungan mampu mencapai Visi dan Misi Kecamatan. Visi dan Misi Desa Kore, selain merupakan Visi dan Misi Calon Camat Sanggar Terpilih, juga diintegrasikan dengan aspirasi kolektif masyarakat Sanggar. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif, dimulai dari tingkat RT/RW, Dusun, hingga tingkat Desa, guna memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan yang holistik dan inklusif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan serta harapan masyarakat setempat.

Adapun Visi Camat Sanggar adalah sebagai berikut :

”Mewujudkan Masyarakat Sanggar yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Semangat Gotong-Royong”

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Infrastruktur Kecamatan Sanggar yang baik
2. Membangun Infrastruktur Pertanian dan Peternakan bagi Masyarakat Sanggar
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Sanggar
4. Meningkatkan Kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Sanggar
5. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat Sanggar
6. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan kesadaran Beragama Bagi Masyarakat Sanggar
7. Menggalakkan Kegiatan-kegiatan Budaya.

Tabel 4.2
Batas Wilayah

Utara	Teluk Sanggar, Laut Flores
Timur	Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu
Selatan	Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu
Barat	Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima

Sumber: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

Tabel 4.3
Nama-nama Desa Kecamatan Sanggar

No.	Nama Desa
1.	Desa Taloko
2.	Desa Sandue
3.	Desa Kore
4.	Desa Boro
5.	Desa Piong
6.	Desa Oi Saro

Sumber: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

Tabel 4.4
Anggaran Pembelanjaan Desa Se-Kecamatan Sanggar

DESA	ANGGARAN
Desa Taloko	Rp. 1.737.027.170
Desa Sandue	Rp. 1.567.870.000.00
Desa Kore	Rp. 1596.850.000.00
Desa Boro	Rp. 1.489.865.000.00
Desa Piong	Rp. 1.564.720.000.00
Desa Oi Saro	Rp. 1.387.640.000.00

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

4.1.1 Pendidikan

❖ Data Pendidikan

Gambaran bidang pendidikan di Kecamatan Sanggar kabupaten Bima dapat diukur melalui jumlah dan jenis sarana pendidikan yang ada.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berpengaruh besar pada keberhasilan pembanguna. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan juga tinggi, terlihat dari tempat-tempat pemeriksaan kesehatan yang sering dikunjungi seperti

puskesmas, pustu, bidan, dan dokter. Pendidikan adalah program penting dalam mengatur masalah kependudukan. Upaya ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan di anggap sebagai modal untuk masa depan yang panjang. Informasi tentang tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dapat di lihat dalam table berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	TK / PAUD	6
2.	SDN	6
3.	SLPT/Sederajat	1
4.	SMA/Sederajat	2
	Jumlah	15

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Tahun 2023

2. Fasilitas Pendidikan

Segi pendidikan terdapat beberapa sekolah yang menunjang aktivitas pendidikan di Kecamatan Sanggar Mulai dari tingkat Paud sampai MA.

❖ Ketenagakerjaan

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Sanggar, seperti kebanyakan desa di Kabupaten Bima, menggantungkan mata pencaharian utamanya pada pertanian. Fenomena ini terkait dengan adanya luasnya lahan pertanian yang tersedia di wilayah tersebut, serta potensi sumber daya alamnya. Selain itu, sebagian masyarakat juga memiliki lahan garapan pribadi untuk kegiatan pertanian mereka.

Secara rinci mata pencaharian pokok masyarakat Kecamatan Sanggar sebagai berikut:

Tabel 4.6
Mata Pencaharian Pokok Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani	549 Orang
2.	Buru Tani	75 Orang
3.	PNS	150 Orang
4.	Pedagang Keliling/Bakulan	15 Orang
5.	Pengusaha	15 Orang
6.	Nelayan	31 Orang
7.	TKI/TKW	3 Orang
Jumlah		838

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

Berdasarkan table diatas dapat dilihat dari sekian jumlah penduduk Kecamatan Sanggar terdapat 549 orang bekerja sebagai Petani, 75 orang sebagai Buruh Tani, 15 orang bekerja sebagai Pedagang, 150 orang bekerja sebagai PNS, 31 orang sebagai Nelayan, dan 3 orang bekerja sebagai TKI/TKW.

4.1.2 Kesenian dan Kebudayaan

Pembangunan budaya di Kecamatan Sanggar dimaksudkan untuk memelihara, mengembangkan, serta melestarikan seni budaya daerah, sekaligus mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya di tengah arus informasi global yang semakin luas. Kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat menjadi penting dalam upaya menghidupkan kembali aktivitas yang berakar pada tradisi dan kearifan

lokal. Contoh dari upaya ini adalah usaha untuk menampilkan kelompok seni dalam setiap acara sosial masyarakat dan kegiatan pemerintah.

4.1.3 Tempat Peribadatan

Dalam konteks keagamaan, ketersediaan sarana ibadah seperti masjid atau mushollah yang representatif sangatlah penting. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan tempat berkumpulnya masyarakat desa untuk menjalin silaturahmi. Di samping itu, Kecamatan Sanggar juga dilengkapi dengan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 4.7
Ketersediaan Sarana Ibadah

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Masjid	6 unit
2.	Jumlah Mushollah	5 unit

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

4.1.4 Keadaan Ekonomi Kecamatan Sanggar

Kecamatan Sanggar adalah wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, yang menyebabkan mayoritas penduduknya bergantung pada mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, dengan tambahan beberapa pekerjaan sampingan seperti buruh, ojek, pedagang, dan sejenisnya. Meskipun kenyataannya, persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja terbatas di wilayah ini. Kondisi ekonomi di Kecamatan Sanggar menunjukkan keragaman yang signifikan.

❖ Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dan pastinya juga perlengkapan-perengkapan kantor yang memadai khususnya dalam hal penyusunan rencana pengimplementasian dana desa untuk meningkatkan pembangunan serta mencengah kesenjangan dalam masyarakat. Selain itu adanya ruang dan tempat yang digunakan untuk musyawarah dapat memudahkan pemerintah desa untuk menyusun rencana pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menunjang dan tanggungjawab Pemerintah Kecamatan Sanggar memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 4.8
Sarana dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Sanggar

No.	Alat	Keadaan	Jumlah
1.	Gedung Kantor	Baik	1
2.	Aula / Ruang Rapat	Cukup Baik	1
3.	Ruang Kerja	Cukup Baik	3
4.	Rumah Dinas Kepala Desa	-	-
5.	Rumah Dinas Perangkat Desa	-	-
6.	Mesin Tik	-	-
7.	Meja	Cukup Baik	10
8.	Kursi	Cukup Baik	116
9.	Lemari Arsip	Cukup Baik	4
10.	Komputer / Laptop	Cukup Baik	2
11.	Mesin Fax	-	-
12.	Kendaraan Dinas	Cukup Baik	1

13.	Buku Data Peraturan Dinas	Cukup Baik	1
14.	Buku Keputusan Kepala Desa	Cukup Baik	1
15.	Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Cukup Baik	1
Total			141

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

Berdasarkan table diatas dapat dilihat untuk sarana dan prasarana dikantor Kecamatan Sanggar cukup baik, sehingga dapat menunjang kinerja perangkat desa.

4.2 Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian lapangan yang mencakup wawancara dan pengamatan penulis mengenai Gaya Kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa, dapat digambarkan melalui hasil analisis berikut:

4.2.1 Gaya Kepemimpinan Camat Mempengaruhi Kualitas Koordinasi dan Kolaborasi Antara Pihak-Pihak Terkait Dalam Implementasi Dana Desa

Kepemimpinan memiliki makna yang beragam bagi individu yang berbeda. Gary Yukl (1998) menjelaskan bahwa istilah kepemimpinan adalah istilah umum yang telah dimasukkan ke dalam domain teknis sebuah disiplin ilmiah tanpa mendapatkan definisi yang jelas. Akibatnya, istilah ini memiliki beragam konotasi yang saling terkait, menciptakan ambivalensi dalam pemahaman. Selain itu, penggunaan istilah-istilah lain yang tidak tepat seperti kekuasaan, kewenangan, manajemen, administrasi, kontrol, dan supervisi juga

seringkali menyebabkan kebingungan dalam menggambarkan fenomena kepemimpinan. Terry (1986) mengemukakan definisi kepemimpinan sebagai "hubungan di mana yang diinginkan adalah mencapai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam melakukan pekerjaan yang benar atau kemampuan untuk memilih tujuan/sasaran yang tepat".

a. Konsep Efektivitas Implementasi Dana Desa

Menurut Sedarmayanti (2009), efektivitas diartikan sebagai parameter yang menunjukkan sejauh mana tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi dapat tercapai. Pendapat ini menegaskan bahwa efektivitas adalah ukuran yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai pencapaian tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Mahmudi (dalam Rusli, 2013) mengemukakan bahwa efektivitas merujuk pada hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ingin dicapai; semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif suatu program atau kegiatan tersebut. Dari analisis ini, dapat dipahami bahwa konsep "efektivitas" mencakup beberapa dimensi, termasuk tercapainya tujuan dalam konteks administrasi kabupaten/kota. Kecamatan, yang dipimpin oleh seorang camat, memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya yang mencakup sebagian wewenang yang didelegasikan oleh bupati atau walikota untuk mengelola urusan otonomi daerah. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peraturan

pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pada pasal 14, menetapkan bahwa kecamatan berperan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bertindak sebagai pelaksana teknis kewilayahan dengan wilayah kerja yang ditetapkan, dan dipimpin oleh seorang camat. Camat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Dengan mempertimbangkan kedudukan, status, tugas, dan fungsi camat, jelas bahwa camat sebagai pemimpin kecamatan memegang peranan strategis dalam memastikan efektivitas implementasi dana desa.

b. Konsep Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Dana Desa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah "peranan" berasal dari kata "peran" (role) yang merujuk pada peran seorang pemain dalam sandiwara. Secara lebih spesifik, "peranan" diartikan sebagai "bagian atau status utama yang dipegang seseorang" (Poerwadarminta, 1994). Abdulsyani (2002) mengemukakan bahwa secara luas, "peranan" merujuk pada tindakan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan telah berperan ketika ia telah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat atau dalam suatu organisasi. Dari penafsiran ini, terlihat bahwa peranan dalam kehidupan masyarakat atau organisasi adalah aspek yang dinamis dari status atau kedudukan individu; dengan kata lain, pelaksanaan hak dan

kewajiban sesuai dengan statusnya menandakan bahwa individu tersebut telah menjalankan peran. Oleh karena itu, hubungan antara peranan dengan status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan; tanpa peranan tidak akan ada status atau kedudukan yang jelas, begitu juga sebaliknya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah tingkat kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam menjalankan tugasnya memperoleh sebagian wewenang dari bupati atau walikota untuk mengurus sebagian urusan otonomi daerah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan pada Pasal 14 bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pelaksana teknis di bidang kewilayahan, dengan wilayah kerja yang tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Dengan demikian, berdasarkan posisi, status, serta tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Camat, terlihat jelas bahwa Camat sebagai kepala Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas implementasi dana desa.

c. Transparansi

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, transparansi merupakan prinsip fundamental yang mengedepankan keterbukaan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi secara menyeluruh mengenai keuangan desa. Prinsip ini mendorong pemerintah desa untuk bersikap terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sumber Daya

Kualitas sumber daya sangat memengaruhi pelaksanaan program dana desa, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin efektif pula implementasi kebijakan tersebut. Secara mendasar, tujuan dari pelaksanaan dana desa adalah untuk memajukan pembangunan di tingkat desa, termasuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia desa agar dapat melaksanakan tugas mereka secara optimal.

Kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pelaksana cukup merata, yaitu secara pendidikan sudah cukup memadai

sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara penulis bersama Bapak Ahmad selaku Camat Sanggar menjelaskan bahwa:

“keberhasilan proses dari implementasi kebijakan sangatlah bergantung dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, finansial dan waktu. Dari segi pendidikan sumber daya manusia di Kecamatan Sanggar yakni dalam pelaksanaan atau penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa cukup merata, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan yang ada. “(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kore Kecamatan Sanggar sangat dibutuhkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik, baik dari segi pendidikan pemerintah desa atau aparatur desa maupun dari tingkat pendidikan masyarakat desa, karena dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan pengidentifikasian dan penyelesaian masalah dengan cepat.

e. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan merupakan keinginan yang dimiliki oleh pelaksana untuk melaksanakan kewajiban. Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui tugas yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, mereka juga harus menunjukkan kemauan

yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemampuan dan kemauan ini merupakan dua komponen esensial yang saling melengkapi, yang sangat diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kore Kecamatan Sanggar, yaitu:

“jika menginginkan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan efektif, maka kita selaku pelaksana kebijakan desa harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam pengimplementasian program, kita juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, saya menegaskan bahwa kami selaku pelaksana pembangunan kebijakan dalam implementasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mengharapkan hasil yang baik serta efektif” (wawancara dilakukan 10 Januari 2024).

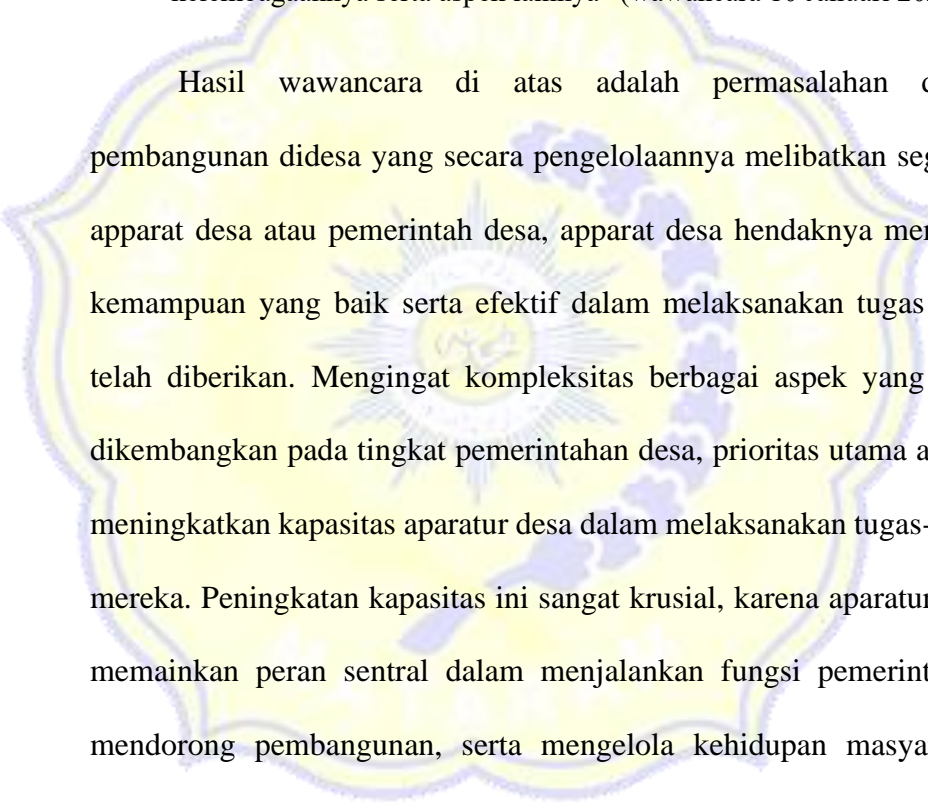
Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pemerintah desa Kore Kecamatan Sanggar selaku pelaksana dari program kegiatan kebijakan berkewajiban untuk dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pengimplementasian program yang telah dibuat, dengan kata lain pemerintah desa harus memiliki rencana terlebih dahulu, yaitu dengan menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Tujuan dari penyusunan rencana pembangunan adalah untuk mempermudah pemerintah desa selaku pelaksana dalam pengimplementasian program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan menurut data sekunder diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan dan proses implementasi kebijakan dana desa salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Sumber daya alam yang dapat dilihat yaitu dari sisi lahan, letak geografis desa dan potensi alam yang dapat dihasilkan. Untuk sumber daya manusia, yang dapat dilihat adalah tingkat pendidikan yang tersedia di desa, tingkat pendidikan dari pemerintah desa selaku aparat yang menjalankan kebijakan dan tingkat pendidikan masyarakat desa menurut data sekunder di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pemerintah desa Kore Kecamatan Sanggar tergolong cukup baik.

f. Struktur Organisasi Pemerintah

Salah satu elemen vital dalam pemerintahan adalah keberadaan peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan pemerintah desa yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat desa. Instrumen-instrumen hukum ini bertujuan menciptakan tatanan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembangunan desa. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan, menjadi dasar untuk pemberian sanksi atau hukuman, serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

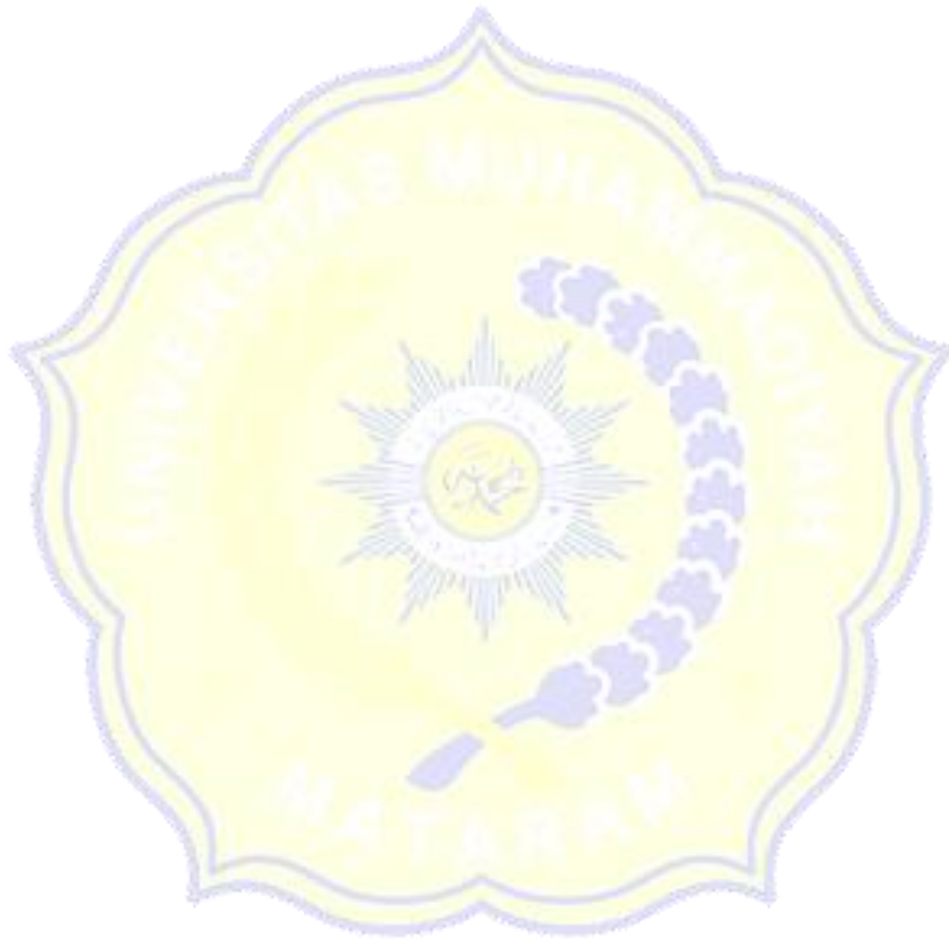
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhamad Tayeb selaku Kepala Desa Kore Kecamatan Sanggar.

“Permasalahan dan tantangan pembangunan didesa yang semakin mengarah pada multi dimensi secara pengelolannya melibatkan segenap aparat pemerintah desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas adminitrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek lainnya” (wawancara 10 Januari 2024)”.

Hasil wawancara di atas adalah permasalahan dalam pembangunan didesa yang secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat desa atau pemerintah desa, aparat desa hendaknya memiliki kemampuan yang baik serta efektif dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Mengingat kompleksitas berbagai aspek yang akan dikembangkan pada tingkat pemerintahan desa, prioritas utama adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Peningkatan kapasitas ini sangat krusial, karena aparatur desa memainkan peran sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan, mendorong pembangunan, serta mengelola kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab sebagai pembina ketenteraman dan ketertiban di wilayah administratif mereka. Upaya peningkatan kapasitas aparatur desa mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan, serta penguatan kelembagaan, yang

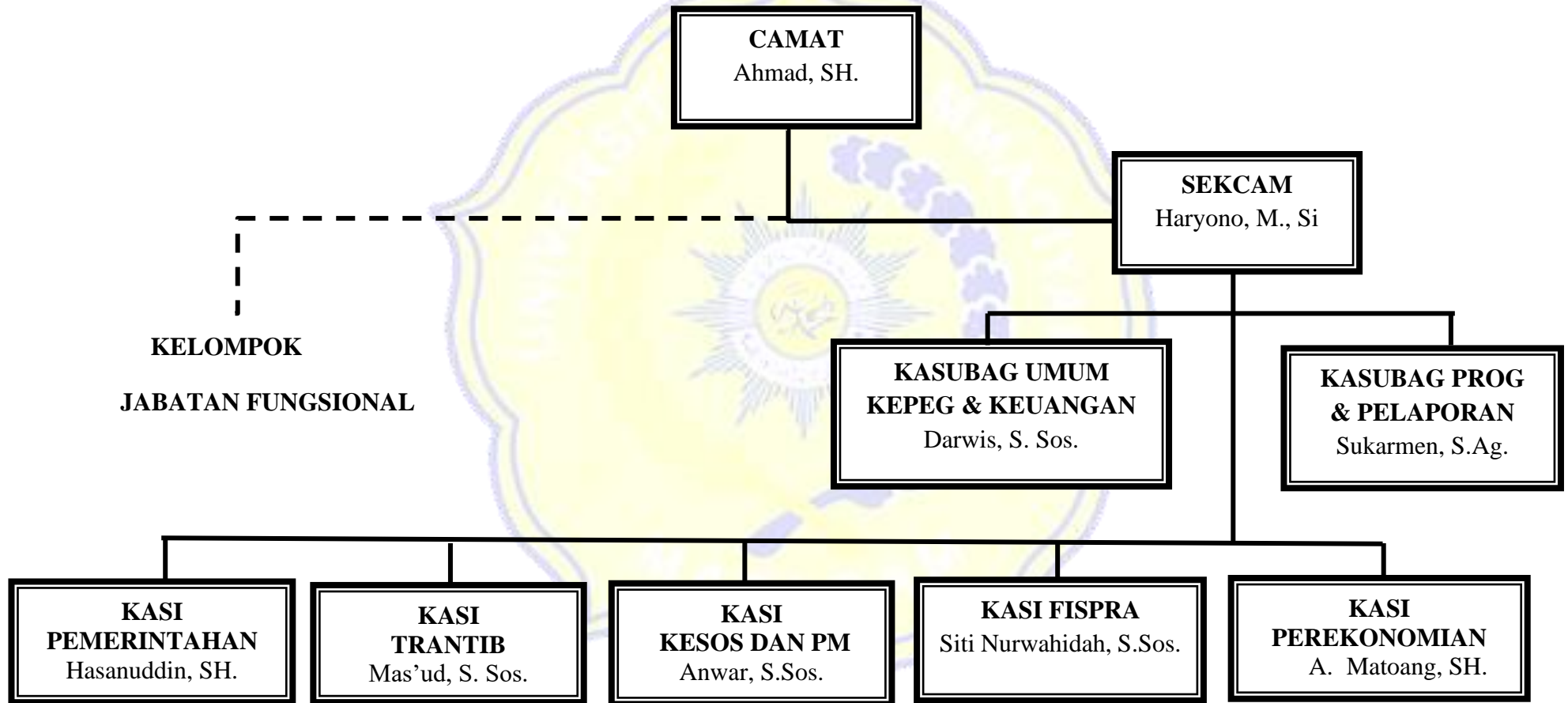
semuanya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pemerintah Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dijalankan atau didukung oleh perangkat Desa yang berjumlah 15 orang, dengan susunan gambar sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT SANGGAR

KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB



Tabel 4.9
Jumlah Perangkat Camat Sanggar

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Ahmad, SH.	Camat	S1	Laki-laki
2.	Haryono, M. Si.	Sekcam	S1	Laki-laki
3.	Darwis, S.Sos.	Kasubag Umum Kepeg & Keuangan	S1	Laki-laki
4.	Sukarmen, S.Ag.	Kasubag & Prog Pelaporan	S1	Laki-laki
5.	Hasanuddin, SH.	Kasi Pemerintahan	S1	Laki-laki
6.	Mas'ud, S.Sos	Kasi Trantib	S1	Laki-laki
7.	Anwar, S. Sos.	Kasi Kesos Dan PM	S1	Laki-laki
8.	Siti Nurwahidah, S.Sos.	Kasi Fispra	S1	Perempuan
9.	A. Matoang, SH.	Kasi Perekonomian	S1	Laki-laki

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan table di atas dapat dilihat bahwa yang di maksud dengan salah satu aspek yang terlebih dahulu di bangun adalah meningkatkan kemampuan aparat desa dalam melakukan tugasnya salah satu cara untuk menentukan kinerja aparat pemerintah camat sanggar adalah dengan melihat tingkat pendidikan dari aparat desa, secara umum Pemerintah Kecamatan Sanggar memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, sehingga di harapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik agar segala rencana atau program yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik yang nantinya akan mendapatkan

hasil yang baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sanggar.

4.2.2 Gaya Kepemimpinan Camat mempengaruhi Efisien dan Penggunaan Dana Desa

Dalam implementasi dana desa di desa Taloko Kecamatan Sanggar tentu saja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana desa di desa Taloko Kecamatan Sanggar sebagai berikut:

4.2.2.1 Efisiensi

Efisiensi merupakan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Dalam konteks efisiensi kebijakan, hal ini merujuk pada sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa harus dievaluasi untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan telah mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai penggunaan sumber daya tetapi juga mempertimbangkan aspek waktu dan tenaga yang telah dikerahkan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai secara optimal dengan meminimalkan pemborosan. Dengan demikian, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah desa dalam konteks manajemen sumber daya yang tersedia.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara kepada bapak selaku Bendahara Desa Taloko Kecamatan Sanggar:

“untuk biaya yang digunakan untuk pengimplementasian suatu kebijakan atau program, salah satunya adalah mengenai implementasi dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak serta merta dapat digunakan secara langsung, karena harus mengacu kepada RPJM yang telah disepakati. Semua pencatatan setiap pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan insah Allah tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan, serta melakukan tutup buku setiap pertanggungjawaban kepada kepala desa” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024).

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara penulis dengan Kasim Ja'e selaku Kepala Desa Taloko Kecamatan Sanggar mengatakan bahwa:

“untuk pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan di desa ini masyarakat tidak dilibatkan langsung akan tetapi yang melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya adalah masyarakat sendiri, selain itu kami dari aparat desa juga menyampaikan informasi yang dibutuhkan, adanya pencatatan tersebut semata-mata karena masyarakat yang menjalankan, untuk kami selaku pemerintah desa sangat mengharapkan agar setiap implementasi program atau kebijakan dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang baik, dimana hasil tersebut nantinya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber di atas bahwasannya efisiensi pemerintah desa dalam mencapai efektivitas yang diinginkan oleh masyarakat belum maksimal, namun pemerintahan desa berusaha untuk tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan serta meningkatkan pembangunan di Desa Taloko Kecamatan Sanggar, masyarakat Desa Taloko Kecamatan Sanggar dalam **upaya** penatusahaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah memberikan dukungan dengan adanya keterlibatan masyarakat atau kontribusi dalam menjalankan system pemerintahan desa.

4.2.2.2 Pencapaian Tujuan

Dalam merealisasikan tujuan dari pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dimanfaatkan kemudian dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Karena setelah undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 disahkan, maka keberadaan hukum yang mengatur tentang Desa semakin kuat. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan untuk membangun masyarakat dan membangun bangsa secara keseluruhan, demi mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhdar M. Sidik kepala desa Sandue dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis yang bertempat dikantor desa menjelaskan bahwa:

“suatu program atau kebijakan tidak bisa dikatakan berhasil apabila hasil dari pengimplementasiannya tidak dapat dilihat, dirasakan dan diukur. Karena pada hakekatnya suatu program dibuat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi dana desa salah satunya adalah pencapaian tujuan dengan hasil yang diinginkan agar masyarakat juga dapat merasakan, melihat serta mengukur keberhasilan dari suatu program”. (wawancara 10 Januari 2024)

Menurut hasil wawancara dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa suatu program atau kebijakan tidak akan dapat dikatakan berhasil atau tuntas apabila masyarakat tidak bisa melihat hasil dan merasakannya, karena sesungguhnya tujuan dari pelaksanaan suatu program untuk kesejahteraan masyarakat dibuat agar dapat membuat masyarakat lebih sejahtera. Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi

dana desa salah satunya adalah pencapaian tujuan dengan hasil yang diinginkan agar masyarakat juga dapat merasakan, melihat serta mengukur keberhasilan dari suatu program, dengan demikian masyarakat harus selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah yang bertujuan untuk membahas mengenai program-program yang akan diterapkan oleh pemerintah desa.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam seluruh tahap kegiatan, mulai dari perumusan ide hingga penyusunan akhir rencana pembangunan. Untuk mencapai pengelolaan pembangunan desa yang optimal, diperlukan pendekatan pembangunan yang terpadu guna memastikan pencapaian target pembangunan. Keberhasilan pengelolaan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sebagai sasaran utama. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat secara efektif mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik yang diterima. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dihasilkan sebagai pencapaian.

Tabel 4.10
Pencapaian pembangunan di Kecamatan Sanggar 2023

No.	Jenis Pembangunan	Jumlah
1.	Jembatan	3
2.	Jalan Tani	8
3.	Masjid	4
4.	Mushollah	5
5.	Bagunan Polindes	1
6.	Gedung Guna	1
7.	Bangunan Pasar	1

Sumber Data: Profil Kecamatan Sanggar 2023

Salah satu usaha yang masuk dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh camat adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembangunan fisik maupun non-fisik. Sebab camat memiliki peran yang penting sebagai administrator di bidang pembangunan, antara lain usaha dan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan guna membantu kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tabel 4.11
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sanggar

No.	Jenis Pemberdayaan
1.	Pemberdayaan Perempuan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penggerak utama kegiatan PKK Desa ➤ Menjadi kader/pengurus Posyandu untuk lembaga kesehatan ibu dan anak ➤ Menjadi kader dalam kegiatan KB

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berperan aktif dalam kegiatan social dan gotong royong secara rutin di masing-masing lingkungan
2.	Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan PoskesDes ➤ Posyandu ibu hamil dan anak-anak ➤ Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Sumber Data: Sekretaris Camat Sanggar 2023

Menurut data sekunder di atas dapat disimpulkan bahwasannya suatu program atau kebijakan dapat di katakana berhasil apabila hasil dari implementasinya dapat dilihat, dirasakan dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah Camat harus melibatkan masyarakat sebagai target utama dalam pengimplementasian dana desa, dengan melihat data sekunder di atas dapat diketahui bahwasannya terkait program atau kebijakan pemerintah Camat Sanggar baik dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat sudah dapat dikatakan baik. Dalam memberdayakan masyarakatnya pemerintah Camat Sanggar telah menyediakan program-program serta sarana-sarana yang dapat dilihat, dirasakan serta berdampak baik bagi masyarakat, selain itu hal ini juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Sanggar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gaya kepemimpinan Camat Sanggar Kabupaten Bima Terhadap Efektivitas Implementasi Dana Desa dengan melihat aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa, yang pertama adalah aspek komunikasi. Kemudian sumber daya, kualitas sumber daya sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi dana desa.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi dana desa di Kecamatan Sanggar adalah partisipasi masyarakat, Sanggar mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Sanggar yang mulai ikut berpartisipasi dalam program-program yang diadakan oleh pemerintah, seperti mulai ikut berpartisipasi pada musyawarah yang di adakan Camat, gotong royong dan bersama-sama melestarikan desa. Selain itu kepuasan dari masyarakat atas efektivitas implementasi dana desa di Kecamatan Sanggar juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.

5.2 Saran

Setelah memaparkan analisis, hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan beberapa saran untuk Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yaitu:

1. Saran Untuk Pemerintah Camat Sanggar

Pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan desa diharapkan lebih memperhatikan pembangunan non fisik di Kecamatan Sanggar seperti pembangunan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menggalih potensi bakat masyarakat Sanggar, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih berkembang menuju perekonomian yang lebih baik.

2. Saran Untuk Masyarakat Sanggar

Diharapkan untuk masyarakat Sanggar agar lebih berpartisipasi lagi dalam membangun desa, masyarakat harus lebih kritis dan mengkritik, memberi saran kepada pemerintah desa sehingga program-program kerja pemerintah menjadi lebih berkualitas serta berorientasi meningkatkan taraf hidup maupun ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Doe, J. (Tahun). *“Leadership Styles and Organizational Performance: A Literature Review.”* Journal of Management Studies.
- Inoue, M., Terauchi, D., Fujii, K., Tsunoda, K., Okubo, N., Takamura, Y.,...& Nath, T. K. (2022). Understanding local peoples’ participation as “Means” and “Ends” in protected areas management: A qualitative study in the heart of Borneo. *Journal of Sustainable Forestry*, 41(3-5), 386-397.
- Martinis Yamindan Maisah. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen Masa Depan*. Bogor: IPB Press.
- Johnson D. (Tahun). *“The Relationship between Leadership Style and Organizational Effectiveness: A Review of Theoretical Perspectives.”* *Leadership Quarterly*.
- Thoha Miftah. (2010). *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta, Gava Media.
- Rahman, A. (Tahun). *“The Role of Local Government in Implementing Village Fund: A Case Study in Indonesia.”* *Journal of Public Administration and Governance*.
- Rini listiyani. (2015). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa*. *Jurnal Publik* (2015), 1.
- Riska Yuliani. (2012). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*. (Boyolali:2012), 76.
- Thompson S. (Tahun). *“The Influence of Leadership Styles on the Success of Development Projects: A Case Study in Rural Communities.”* *Community Development Journal*.
- Smith, J. (Tahun). *“The Impact of Leadership Styles on the Literature.”* *International Journal of Business and Management*.
- Sutoro Eko. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta.
- Sumaryadi (2005) *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Veithzal Rivai. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.